

Gorontalo dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

PERTUMBUHAN Ekonomi selalu menjadi sorotan dari para ahli ekonomi, praktisi maupun pemerintah karena selalu menjadi ukuran kinerja dari pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam sorotan perpektif akhir tahun capaian pertumbuhan ekonomi selalu menjadi acuan dan kebanggaan oleh pemerintah dalam menilai kerjanya. Namun, apakah pertumbuhan ekonomi sudah mewakili semua variabel yang dibutuhkan dalam menilai kinerja pembangunan. Beberapa ahli ekonomi mengungkapkan bahwa yang terpenting apakah pertumbuhan ekonomi telah berdampak pada pemerataan pendapatan, terbukanya kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana eksternal dalam melaksanakan pembangunan. Disinilah letaknya pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi penting untuk dibahas. Dalam tulisan ini hendak disimak pertumbuhan ekonomi Gorontalo saat ini apakah sudah menggambarkan kualitas pertumbuhan ekonomi?

Dimensi Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir capaian pertumbuhan ekonomi Gorontalo memiliki progres yang bagus dan selalu di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional misalnya tahun 2016 mencapai 6,52 di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 %. Walaupun demikian

capaian pertumbuhan ekonomi Gorontalo tergolong moderat karena masih di atas pertumbuhan ekonomi dari beberapa provinsi yang hanya mencapai pertumbuhan ekonomi di bawah 5 %, tapi masih di bawah dari angka pertumbuhan ekonomi dari beberapa provinsi seperti daerah tetangga kita Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 9,98 % tahun 2016. Publikasi Badan Pusat Statistik yang dirilis dalam beberapa media sosial bahwa Gorontalo termasuk 10 besar Provinsi termiskin di Indonesia dengan angka kemiskinan tahun 2016 sebesar 17,72 % selain Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Bengkulu, Sulawesi Tengah dan Lampung serta Maluku (sumber: Website BPS-RI). Dalam media ini penulis mengungkapkan kekhawatiran bahwa kemiskinan di Gorontalo akan masuk dalam perangkap kemiskinan karena dalam kurun waktu 2011 sd 2016 bertengger pada angka diantara 17 sd 18 %. Selain terkait dengan pengurangan angka kemiskinan pertumbuhan ekonomi Gorontalo juga tidak berdampak signifikan terhadap pemerataan pembangunan yang dicirikan oleh angka Gini Ratio pada bulan Maret 2012 sebesar 0,437 dan pada Maret 2016 walaupun terjadi penurunan tapi masih di atas 0,4 yaitu sebesar 0,419 (sumber: Website BPS Provinsi Gorontalo). Hal ini bisa diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan



Oleh
Fachrudin Zain Oilingo

oleh sebagian kecil penduduk terutama yang berpendapatan menengah ke atas. Selain daripada itu ketergantungan terhadap dana pusat juga tidak mengalami penurunan, yang berarti pembangunan yang selama ini dilaksanakan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi tidak berdampak pada kemandirian daerah. Sebagai ilustrasi pada tahun 2015 rasio Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah sebesar 20,84 % dan pada tahun 2016 malah menurun menjadi 19,61 % (Sumber Gorontalo Dalam Angka 2017). Dari ilustrasi angka-angka di atas jelas bahwa untuk tahun 2018 dan seterusnya pemerintah Gorontalo harus bekerja keras untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang disajikan menjadi lebih berkualitas.

Paradigma Pembangunan.

Dalam pelantikan kabinet NKRI jilid II pada akhir Desember 2017 beberapa waktu yang lalu, Gubernur Gorontalo Drs. H. Rusli Habibie, M.AP mengamanatkan kepada anggota kabinetnya untuk bekerja keras, bekerja tangkas dan bekerja ikhlas.

Pesan Gubernur tersebut mengindikasikan betapa besar harapan masyarakat terhadap strategi yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun ke depan terutama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Penulis menitipkan beberapa pesan dalam menciptakan strategi pembangunan yang didasarkan pada kajian teoris oleh para ahli ekonomi, yaitu: 1). Teori Hirshman tentang The Big Push Theory. Teori ini merekomendasikan tentang fokus pembangunan hendaknya ditujukan pada sektor yang dianggap menjadi sektor yang memimpin (leading sector) dalam perekonomian. Hirshman menyatakan bahwa dengan memberikan porsi anggaran yang lebih besar pada sektor yang memimpin maka paling tidak wujud pembangunan akan nampak dan diharapkan berdampak multiplier pada sektor-sektor lainnya. Sebagai contoh kalau Sektor Pariwisata yang menjadi leading sektor maka perlu diberikan porsi anggaran lebih besar pada sektor ini dan sektor-sektor lainnya anggarannya lebih kecil dan menyesuaikan. Demikian pula dalam membangun destinasi perlu dibangun minimal 1 destinasi yang pembangunannya paripurna sehingga menjadi icon pariwisata daerah. Demikian pula kalau sektor pertanian yang menjadi leading sector, maka pilihlah satu komoditas yang dibangun dari hulu sampai hilir dengan memberikan porsi anggaran yang lebih besar. 2). Perlu dicamkan sinyalemen Prof. Sumitro Djoyohadikusumo

bahwa di Indonesia terjadi pemborosan sekitar 30 % dana pembangunan. Pemborosan dana pembangunan dimaksud antara lain karena laporan data produksi yang tidak akurat dan tidak masuk akal sehingga perencanaan menjadi tidak efektif dan efisien dan hal ini berdampak pada pembangunan infrastruktur pendukung hanya mengedepankan output daripada dampak. Akibatnya overhead cost juga membengkak dan tidak kena sasaran seperti biaya pengawasan, perjalanan dinas, rapat-rapat, makan minum, ATK dan lain-lain. 3). Perlu dicamkan pesan Prof. Reinal Kasali dalam bukunya Disruption bahwa perlu dialokasikan anggaran dalam menciptakan SDM pelaksana pembangunan sehingga bisa mengikuti perkembangan dan memiliki daya saing. Dicontohkan bahwa ketika kereta kuda digantikan kereta mesin banyak terjadi pengangguran karena SDM yang ada tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi sehingga cenderung menganggur. Saat ini terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi digital, maka perlu diantisipasi dengan menciptakan SDM yang siap pakai dari lapisan pelaksana hingga perencana pembangunan. Tentunya hal ini bisa terjadi kalau dilaksanakan secara terencana dan disiapkan anggarannya secara kontinu.

*Penulis Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.